



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2017 – 2018
Masa Sidang : V
Rapat : Ke -
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/Tanggal : Rabu, 6 Juni 2018
Sifat : Terbuka
Pukul : 10.10 WIB s.d 17.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V),
Gedung Nusantara DPR RI.
Acara : Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan RKP TA 2019
Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
Ketua Rapat : Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota : dari 50 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi beserta
jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi pada hari ini adalah pembicaraan pendahuluan RKA K/L dan RKP TA 2019 Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
3. Ketua Rapat mempersilakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami paparan tentang penyesuaian pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi masing-masing sesuai dengan:
 - a. Surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor: KU.01.01-Mn/610 tanggal 3 Mei 2018, Hal: Usulan Penyesuaian Pagu Indikatif Kementerian PUPR Tahun 2019;
 - b. Surat Menhub kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor: KU.002/20/5 PHB 18 tanggal 14 Mei 2018, Perihal: Usulan Penyesuaian Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan Tahun 2019;
 - c. Surat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor: S.510/PR.01.01/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018, Hal: Penyampaian Usulan Perubahan/Pergeseran Pagu Indikatif Kementerian Deasa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2019;

sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

| NO. | KEMENTERIAN/LEMBAGA | PAGU KEBUTUHAN | PENYESUAIAN PAGU INDIKATIF |
|-----|---|-----------------|----------------------------|
| 1. | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 138.363.546.044 | 102.017.001.436*) |
| 2. | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | 104.049.055.186 | 44.132.798.484 |
| 3. | KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI | 4.545.623.104 | 4.545.623.104 |

*) Selain itu terdapat pendanaan melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha – *Availability Payment* (KPBU-AP) pada Kementerian PUPR sebesar Rp.5,103 triliun.

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan penyesuaian pagu indikatif TA 2019 yang diusulkan untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

2. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk memprioritaskan penyelesaian program-program prioritas dalam RPJMN 2014 – 2019 dan terus meningkatkan jumlah alokasi untuk Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (antara lain PISEW, PAMSIMAS, SANIMAS, KOTAKU, TPST-3R), program kerakyatan di sektor perhubungan (antara lain RASS, ZOSS, pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan, pengadaan bus sekolah dan kapal rakyat), dan program kerakyatan lainnya di sektor desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN TA 2019 berdasarkan usul dan pendapat Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan anggota Komisi V DPR RI, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

4. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap alokasi anggaran unit organisasi, fungsi, dan program masing-masing Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.45 WIB.

Jakarta, 6 Juni 2018

KETUA RAPAT,
ttd

FARY DJEMY FRANCIS

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

ttd

M. BASOEKI HADIMOELJONO

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

**MENTERI DESA, PDT, DAN
TRANSMIGRASI,**

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO